

PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Titania Saputri¹, Bayu Kurniawan², Rita Meiriyanti³

Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Indonesia¹

Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Indonesia¹

Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Indonesia¹

Email: tantianasaputri1911gmail.com¹

Abstract: *Economic development is characterized by increasing productivity and per capita income of the population resulting in improvements in welfare. This research aims to examine the direct and indirect influence of local revenue and general allocation funds on per capita income through capital expenditure as an intervening variable. This research is research that uses secondary quantitative data tested using multiple regression methods using path analysis and the Sobel test. This research sample represents the population studied using a total sampling technique obtained from 5 districts/cities in industrial areas over an 8 year period. The data source for this research is the APBD Realization Report document obtained from the website of the Director General of Financial Balance and the Central Statistics Agency via the internet. Partially, it was found that the regional original income variable had a significant effect on capital expenditure and per capita income. However, partially general allocation funds do not have a significant effect on capital expenditure and general allocation funds and capital expenditure do not have a significant effect on per capita income. Based on the Sobel test, it shows that local original income and general allocation funds do not have a significant effect on per capita income through capital expenditure as an intervening variable.*

Keywords: *Original Regional Income; General Allocation Funds; Per Capita Income; and Capital Expenditures.*

Abstrak: Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif sekunder diuji dengan metode regresi berganda pada analisis jalur dan uji sobel. Sampel penelitian ini mewakili populasi yang diteliti dengan teknik *total sampling* didapat 5 kabupaten/kota wilayah industri dengan 8 tahun periode. Sumber data penelitian ini melalui dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik melalui internet. Secara parsial ditemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pendapatan per kapita. Tetapi secara parsial dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal serta dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan uji sobel menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Pendapatan Perkapita; dan Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, memiliki implikasi penting dalam pembangunan daerah secara mandiri melalui perubahan dalam APBD. Pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya wilayahnya dengan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi fiskal juga merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, ketimpangan fiskal antara daerah masih merupakan tantangan, dan pemerintah pusat harus memperhatikan alokasi dana untuk mengatasi hal ini.

Upaya tersebut dilakukan melalui dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk memperbaiki ketidakmerataan infrastruktur di setiap daerah. DAU merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendorong desentralisasi dan pengembangan ekonomi yang merata di seluruh daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya. DAU berperan dalam pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan transparansi alokasi dana.

Peran pemerintah pusat dalam memberikan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah untuk menjamin standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri dan mengurangi kesenjangan antar daerah (Yustriawan, 2021). Pendapatan per kapita daerah menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, namun juga menciptakan tantangan baru karena tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan dalam mengurangi disparitas fiskal dan meningkatkan kesiapan daerah dalam otonomi. Tetapi, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana pusat. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk memperkuat pendapatan asli. Analisis Pendapatan Per Kapita daerah memberikan pemahaman tentang distribusi ekonomi dan tingkat hidup masyarakat. Pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penduduk merupakan variabel penting dalam menentukan kebutuhan layanan publik. Pendapatan Per Kapita adalah indikator kemakmuran dan Perubahan PDRB regional mempengaruhi PDB. Pendapatan per kapita daerah yang kecil menghambat pelayanan dan tugas pemerintah. Studi ini penting untuk menemukan ketidaksetaraan ekonomi dan memperkuat Potensi Pendapatan Asli Daerah. Tingkat kegiatan ekonomi meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Belanja modal dan infrastruktur mendukung peningkatan pendapatan per kapita daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga penting dalam mencapai tingkat pendapatan per kapita.

Kualitas pelayanan publik berhubungan dengan belanja modal yang mengalokasikan dana untuk sarana, prasarana, dan pengembangan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik. Pembiayaan belanja modal harus memperhatikan kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita. Belanja modal dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita. Alokasi anggaran pembangunan juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah. Dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum juga penting untuk peningkatan pendapatan per kapita. Alokasi anggaran yang tepat dapat memperkuat pertumbuhan dan mengembangkan kebijakan yang sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan populasi, yaitu Cikarang, Semarang, Surabaya, Gresik dan Batam dari tahun 2015-2022 dengan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur (*path analysis*), uji hipotesis, dan Uji Sobel (*Sobel Test*) dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

HASIL PENELITIAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS, yang mana pengujian dilakukan dalam signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Variabel	Dependen	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	2,854	0,007	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		-1,153	0,256	Tidak Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	2,283	0,028	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,942	0,352	Tidak Signifikan
Belanja Modal (BM = Z)		-0,716	0,479	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Hasil perhitungan tabel 1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,256 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.
4. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.
5. Variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,479 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Belanja Modal secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

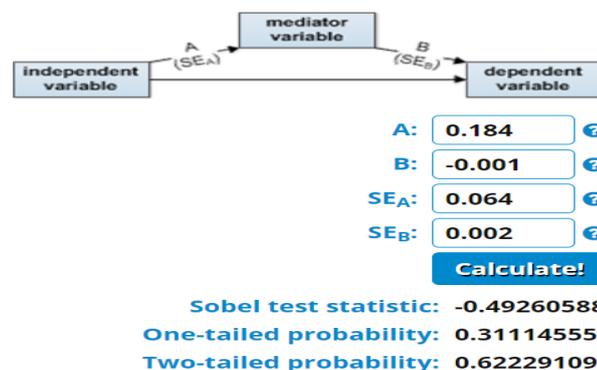
Uji sobel dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (Z).

Tabel 2. Hasil Uji Sobel

Variabel	Dependen	B	SE	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	0,184	0,064	0,622	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		-0,007	0,006	0,645	Tidak Signifikan
Belanja Modal (BM = Z)	Pendapatan Perkapita	-0,001	0,002		

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berikut hasil Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal:

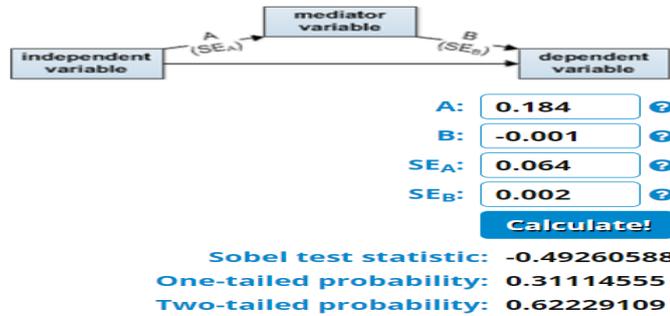


Gambar 1. Hasil Uji Sobel

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, hasil uji Sobel menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan, dengan koefisien regresi (B) sebesar 0.184 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.622. Ini mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator.

Berikut hasil Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal:



Gambar 1. Hasil Uji Sobel

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, hasil yang serupa juga terlihat dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal, yang juga tidak signifikan dengan koefisien regresi (B) -0.007 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.645. Dengan demikian, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum atau Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator dalam konteks ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditemukan beberapa hal-hal sebagai berikut:

Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian secara parsial (Uji T), di mana t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu 2,283 > 2,028 dengan nilai signifikan 0,028 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah di wilayah industri pada tahun 2015-2022 akan meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat Pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah untuk memberi daerah kemampuan untuk mengumpulkan dana untuk menjalankan otonomi daerah itu sendiri.

Pendapatan daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah wilayah industri ini menginvestasikan lebih pada infrastruktur dasar dan kawasan industri. Infrastruktur yang baik mendorong pertumbuhan industri dengan memfasilitasi mobilitas barang dan orang serta menyediakan layanan yang dibutuhkan. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif dan fasilitas bagi industri lokal untuk meningkatkan daya saing. Pendapatan yang cukup juga memungkinkan pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan menarik investasi.

Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 0,942 < 2,028 dengan nilai signifikan 0,352 > 0,05 maka secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

Wilayah industri umumnya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar karena adanya sektor industri aktif dan pajak yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun DAU memiliki kontribusi kecil terhadap pendapatan daerah, wilayah industri memiliki struktur ekonomi yang dinamis dan berorientasi pada sektor industri. Oleh karena itu, penggunaan DAU untuk mendukung pertumbuhan industri di wilayah Bekasi, Semarang, Surabaya, Gresik, dan Batam mungkin tidak efisien. Penggunaan DAU lebih sering digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah daripada meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah industri. Keputusan pengalokasian DAU dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan strategi pembangunan daerah masing-masing.

Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,854 > 2,028$ dengan nilai signifikan $0,007 < 0,05$ maka secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh di suatu wilayah industri dan semakin besar pemanfaatan PAD yang benar, semakin besar anggaran belanja modal. PAD menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk pembangunan, termasuk belanja modal. Tingkat PAD yang tinggi memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk alokasi dana ke infrastruktur, fasilitas industri, dan investasi lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah industri. Investasi dalam belanja modal yang didukung oleh PAD dapat meningkatkan daya saing wilayah industri secara global dan menarik investasi asing dan domestik yang lebih besar.

Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $-1,153 < 2,028$ dengan nilai signifikan $0,256 > 0,05$ maka secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

Penerimaan dana melalui DAU memiliki batasan penggunaan, terutama dalam pengeluaran modal. Pemerintah daerah harus mematuhi regulasi pusat dalam penggunaan DAU untuk belanja modal. Prioritas penggunaan DAU mungkin tidak selalu sesuai dengan prioritas pembangunan wilayah industri. Pemerintah daerah bisa memilih menggunakan DAU untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar. Jumlah DAU yang diterima kurang mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau investasi industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah mencari sumber dana tambahan seperti pendapatan asli daerah, pinjaman, atau investasi swasta.

Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil uji sobel bahwa ubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara koefisien regresi (B) sebesar 0.184 dan nilai signifikansi (Sig) sebesar 0.622, maka mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator.

PAD tidak mencukupi untuk membiayai belanja modal dalam pembangunan infrastruktur dan investasi sektor industri di kabupaten Bekasi, Semarang, Surabaya, Gresik, dan Batam. Wilayah industri membutuhkan investasi besar untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan teknologi, dan pelatihan tenaga kerja. PAD tidak berdampak secara langsung pada pendapatan perkapita di wilayah industri yang diteliti. Pengaruh PAD terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional dan global, serta faktor sosial dan budaya di wilayah industri tersebut. Ini membuat PAD tidak berpengaruh secara langsung pada pendapatan perkapita melalui belanja modal di wilayah industri yang diteliti.

Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil uji sobel bahwa ubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara koefisien regresi (B) sebesar -0.007 dan nilai signifikansi (*Sig*) sebesar 0.645 , maka mengindikasikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan DAU dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah telah dihabiskan untuk keperluan rutin lainnya yang mungkin tidak langsung berdampak pada pendapatan perkapita di wilayah industri. Ketidakpastian dalam pencairan DAU juga dapat menghambat rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah di wilayah industri yang berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi setempat. Serta pendapatan DAU dari pemerintah pusat untuk pengalokasian belanja modal yang tidak tepat atau bukan prioritas menjadikan tidak berpengaruh pula pada pendapatan perkapita khususnya wilayah industri yang diteliti. Kebijakan pemerintah daerah setempat dalam menangani prioritas alokasi belanja modal juga diperlukan dalam upaya pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Pengujian Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t -hitung lebih besar dari t -tabel yaitu $-0,716 < 2,028$ dengan nilai signifikan $0,479 > 0,05$ maka secara parsial Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

Belanja Modal penting untuk pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor industri. Keterbatasan dana bisa menghambat investasi pemerintah daerah. Proses ini membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan dampak signifikan. Ini dapat membatasi pertumbuhan Pendapatan Perkapita dalam jangka waktu singkat. Pengaruh Belanja Modal juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan faktor eksternal lainnya. Perlambatan ekonomi global atau ketidakpastian politik bisa mengurangi permintaan produk industri. Investasi dalam Belanja Modal mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan pada wilayah industri yang diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah di jabarkan, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Wilayah Industri Periode 2015-2022. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil uji yang di lakukan serta kesimpulan yang telah tercantum di bab sebelumnya, peneliti memiliki saran yang dapat digunakan adalah:

1. Pemerintah harus secara efektif dan efisien memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah agar Pendapatan Perkapita Masyarakat terus meningkat, terutama di wilayah industri yang diteliti.
2. Pemerintah Daerah harus memberi prioritas lebih besar pada alokasi Dana Alokasi Umum untuk tujuan yang lebih tepat, sehingga belanja modal dapat lebih terarah.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan luas dan waktu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, untuk membandingkan hasil penelitian, sampel penelitian harus diambil dari lebih banyak kabupaten atau kota pada wilayah industri.
4. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

5. Penelitian ini dilakukan selama delapan tahun yaitu dari 2015 sampai dengan 2022. Sehingga peneliti memberikan saran agar dapat menambah periode waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.22437/Ppd.V4i1.3530>
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2019). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Kota-Kota Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.35794/Jpekd.23449.20.01.2019>
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/Jaj.V7n1.P1-17>
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.(7), 1–11.
- Widyasari, N. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb) (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Feb Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–16.
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5, 717–725. <https://doi.org/10.33395/Owner.V5i2.609>